Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG) 2030: Studi Kasus Lembaga Pendidikan Menengah X di Surabaya

Meylinda Eka Cahyani

Universitas Surabaya, Indonesia

Email: meylinda264@gmail.com

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDG) 2030 dalam Lembaga Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SDG dapat dilaksanakan di lembaga Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang kemudian disusun untuk diambil kesimpulan. Lembaga Pendidikan ini telah banyak melakukan program yang menuju pada tujuan *Sustainable Development Goals* 2030 (SDG 2030) antara lain penerapan SDG 1 (menghapus kemiskinan) dengan Pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum pembelajaran serta membangun pojok usaha kewirausahaan dalam bidang tanaman tradisional yang dinamakan "The Herbs Drink" dengan memproduksi sirup yang berasal dari tanaman tradisional serta pojok usaha kewirausahaan dalam bidang kimia yang dinamakan "FarmClean" dengan memproduksi sabun cuci piring, sabung cuci tangan, pembersih lantai, Handsanitizer, dll. Penerapan SDG 3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan) melalui kesejahteraan seluruh pegawai pada Lembaga Pendidikan melalui menyediakan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kepada semua pegawai dan melakukan kegiatan kampanye Kesehatan pada Masyarakat umum melalui kurikulum pembelajaran dalam mata pelajaran Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM). Penerapan SDG 4 (Pendidikan bermutu) melalui pemberian beasiswa pada siswa serta mengadakan program literasi digital untuk seluruh pegawai yang ada pada Lembaga Pendidikan. Penerapan SDG 5 (kesetaraan gender) dengan menciptakan lingkungan yang merata bagi perempuan dan laki-laki melalui budaya dan kebijakan lembaga. Penerapan SDG 12 (penggunaan dan produksi yang bertanggung jawab) melalui penanganan limbah dari kegiatan praktikum dari laboratorium Pendidikan yang ada di Lembaga. Implikasi penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan manajerial yang terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sosial mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan SDG pada sektor pendidikan.

Keywords: *Sustainable Development Goals* (SDG), SPM, *Spirituality*, *Educational Institutions*

Abstract

Sustainable Development Goals (SDG) 2030 in Educational Institutions. This research aims to find out the extent to which the implementation of SDGs can be implemented in educational institutions. This research uses a case study method which is then compiled to draw conclusions. This educational institution has carried out many programs that lead to the goals of the Sustainable Development Goals 2030 (SDG 2030), including the implementation of SDG 1 (eliminating poverty) with entrepreneurship education in the learning curriculum and building an entrepreneurial business corner in the field of

traditional plants called "The Herbs Drink" by producing syrup derived from traditional plants and an entrepreneurial business corner in the field of chemistry called "FarmClean" with producing dish soap, hand sanitizer, floor cleaner, Hand sanitizer, etc. The implementation of SDG 3 (Good Health and Welfare) through the welfare of all employees in Educational Institutions through providing health insurance and accident insurance to all employees and conducting Health campaign activities for the general public through the learning curriculum in the subject of Public Health Sciences (IKM). The implementation of SDG 4 (Quality Education) through the provision of scholarships to students and holding digital literacy programs for all employees at educational institutions. The implementation of SDG 5 (gender equality) by creating an equal environment for women and men through institutional culture and policies. The implementation of SDG 12 (responsible use and production) through waste handling from practicum activities from the Education laboratory in the Institution. The implications of this study show that a managerial approach that is integrated with spiritual values and social responsibility can increase the effectiveness of the implementation of the SDGs in the education sector.

Keywords: *Sustainable Development Goals (SDG), SPM, Spiritualitas, Lembaga Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, *United Nations* (UN) memulai inisiatif yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals 2030* (SDG 2030) dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua aspeknya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Secara singkat, SDG 2030 bertujuan agar generasi mendatang dapat menikmati dan Mengalami kejadian yang serupa dengan yang sedang kita alami saat ini (Yudawisastra, n.d.). (Lim, 2023).

SDG adalah sebuah kerangka yang telah direncanakan dan didukung oleh pemimpin dunia, termasuk di Indonesia. SDG diimplementasikan secara global dan dalam skala besar. Tujuan utama SDG adalah menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga kelestarian lingkungan (Humaida et al., 2020). SDG mencakup 17 tujuan global dengan 169 indikator yang dapat diukur, yang diharapkan tercapai pada tahun 2030 (Azzahra, 2022; Iskandar, 2020)

Lembaga Pendidikan (sekolah) memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan masa depan pembangunan keberlanjutan seperti yang dijelaskan pada *Sustainable Development Goals 2030* (SDG 2030) (Definitif, n.d.; Husamah, 2024; Tasliah et al., 2024). *Education for sustainable development* (ESD) merupakan strategi penting yang telah diakui secara global (Sari, 2023; Sutanto, 2017). Penerapan agenda pembangunan berkelanjutan mencerminkan perubahan besar dalam prioritas Pendidikan, sebagai contoh, program Aksi Dunia UNESCO tentang ESD pada tahun 2015-2019 (Firdaus & Rusdiyanta, 2017; Gustiana, 2024). ESD dan deklarasi berlin tentang ESD menyerukan pembelajaran transformatif dan menerapkan

perencanaan dan implementasi strategis untuk Pembangunan keberlanjutan (Niemela, 2024).

Tujuan dari program pertumbuhan berkelanjutan untuk lembaga pendidikan adalah mencari solusi untuk memungkinkan lembaga pendidikan berkontribusi dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan mendorong perkembangan berkelanjutan. Berdasarkan komitmen ini, lembaga pendidikan telah berjanji untuk mengikuti program dan bertanggung jawab terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* 2030 (SDG 2030) yang terkait dengan pendidikan, dengan memastikan bahwa semua peserta didik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan (Niemela, 2024).

Lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* 2030 melalui kontribusi dari anggota organisasi (manusia) yang terlibat. Peran yang dimainkan oleh anggota organisasi sangat penting bagi operasional keseluruhan lembaga, karena pikiran mereka mempengaruhi ucapan dan tindakan. Akar masalah sering kali berasal dari energi negatif yang timbul dan diperkuat melalui aktivitas sehari-hari serta interaksi, yang dapat mengakibatkan penderitaan, konflik, kehilangan persatuan dalam komunitas, persaingan internal, dan kehilangan motivasi untuk bertindak dengan baik (Efferin, 2016).

Sistem pengendalian manajemen (SPM) adalah instrumen krusial yang dapat digunakan untuk menjaga keselarasan di dalam organisasi (Hemas, 2025; Kurniawati, 2024). SPM ini adalah suatu sistem yang holistik yang digunakan oleh manajemen untuk mengatur perilaku anggota organisasi agar sejalan dengan tujuan organisasi. Dengan kata lain, SPM berfungsi sebagai pedoman bagi semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota berperilaku sesuai dengan visi perusahaan, baik melalui target yang ditetapkan seperti key performance indicator (KPI) maupun prosedur operasional standar (SOP). Namun didalam penerapan SPM terdapat 3 masalah utama, yaitu *lack of direction*, *personal limitations* dan *motivational problems*. Tiga masalah tersebut merupakan sesuatu yang harus bisa di *cover* oleh SPM. Ketiga masalah ini merupakan hal yang harus dapat diatasi oleh SPM (Efferin, 2016).

Saat ini, SPM tidak hanya fokus pada pengendalian anggota dalam organisasi, tetapi juga memperluas jangkauannya ke aspek yang lebih luas, yaitu hubungan yang saling terkoneksi antara individu di dalam dan di luar organisasi, yang sering kali disebut sebagai spiritualitas. SPM yang berbasis spiritualitas tidak hanya mengarah pada pencapaian target seperti keuntungan dan pangsa pasar, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, semangat dari SPM berbasis spiritualitas adalah menggabungkan misi sosial dan lingkungan dengan misi komersial organisasi.

Minimnya jumlah perusahaan atau lembaga pendidikan di Indonesia yang menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 2030) disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dorongan untuk memaksimalkan keuntungan demi meningkatkan nilai modal bagi pemegang saham, serta tingginya biaya yang terlibat

dalam implementasi berkelanjutan. Selain itu, banyak pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor keberlanjutan, yang sering kali membutuhkan investasi besar dengan potensi keuntungan yang tidak pasti dalam jangka pendek (Azzahra, 2022).

Sebuah Lembaga pendidikan tidak akan mampu secara sendirian mewujudkan tujuan program *Education for sustainable development* (ESD), melainkan sangat membutuhkan dukungan dari seluruh SDM yang ada didalam Lembaga pendidikan, *rekanan*, pelanggan (Orang tua), pemerintah dan masyarakat umum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan sistem pengendalian manajemen berbasis spiritualitas dengan implementasi multi-dimensi SDG, khususnya SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 3 (kesehatan dan kesejahteraan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 5 (kesetaraan gender), dan SDG 12 (konsumsi-produksi bertanggung jawab). Pendekatan ini jarang dieksplorasi dalam konteks lembaga pendidikan menengah dan memberikan sudut pandang baru dalam mengelola organisasi pendidikan yang berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana sistem pengendalian manajemen diterapkan dalam mendukung pencapaian SDG 2030 di Lembaga Pendidikan Menengah X di Surabaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi serta solusi strategis yang diambil oleh lembaga pendidikan dalam proses integrasi nilai SDG. Implikasi dari penelitian ini mencakup kebijakan internal lembaga pendidikan yang lebih terstruktur dalam menjalankan peran sosialnya serta menghasilkan budaya organisasi yang inklusif, transformatif, dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang instrumen evaluasi capaian SDG di sektor pendidikan dengan pendekatan yang lebih holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam implementasi sistem pengendalian manajemen (SPM) dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG) 2030 di Lembaga Pendidikan Menengah X di Surabaya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif, di mana peneliti berfokus pada fenomena kontekstual yang terjadi secara nyata dan kompleks dalam lembaga pendidikan tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan di lembaga pendidikan, meliputi kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa. Sampel ditentukan secara purposive, dengan memilih informan kunci yang dianggap memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung terhadap implementasi SDG dan sistem pengendalian manajemen.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali informasi tentang strategi lembaga dalam mencapai tujuan SDG melalui penerapan sistem pengendalian manajemen berbasis

spiritualitas. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, dilakukan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber (kepala sekolah, guru, siswa), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member checking untuk mengonfirmasi keabsahan interpretasi data kepada para informan. Selain itu, dilakukan audit trail dan peer debriefing guna menjamin keandalan data dan proses penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aktivitas lembaga, serta dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, laporan tahunan, dan kebijakan lembaga terkait SDG. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) dengan perangkat lunak bantu seperti NVivo untuk memudahkan pengelompokan dan pemaknaan data. Prosedur penelitian dilakukan secara berurutan mulai dari tahap identifikasi masalah, pengumpulan data lapangan, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Seluruh proses mengikuti prinsip etika penelitian, termasuk *informed consent* dan kerahasiaan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghapus Kemiskinan

Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan sosial yang meliputi ketimpangan dalam pendidikan dan kesenjangan dalam tingkat kemiskinan di masyarakat. Salah satu fokus utama adalah mengatasi masalah kemiskinan, yang menjadi prioritas bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Upaya yang gigih dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan, karena dampak negatifnya meliputi tingginya tingkat pengangguran, ketidaksetaraan sosial, dan angka kematian yang tinggi.

Dengan memperoleh pendidikan dan keterampilan, seseorang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pendidikan tentang kewirausahaan dapat berfungsi sebagai cara untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu membangun sistem ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Ini juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, memberikan masyarakat kesempatan untuk mengembangkan ekonomi mereka sendiri, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, usaha ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan (Akhmad, 2021)

Strategi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan menyediakan kurikulum Pendidikan kewirausahaan yang relevan dan komprehensif serta menyediakan anggaran untuk kegiatan pelatihan guru agar mampu mengajar kewirausahaan yang sesuai dengan tren era sekarang. Indikator pencapaian dalam hal ini dapat diketahui pada nilai rapor Pendidikan yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Nilai yang tertera pada rapor Pendidikan dapat digunakan sebagai evaluasi dan tindak lanjut dalam penerapan SDG ini dalam periode berikutnya. (Kementrian Pendidikan, 2022)

Keberhasilan lembaga Pendidikan dalam mencapai nilai rapor Pendidikan pada aspek input dimensi c pengalaman pelatihan guru serta nilai pada aspek proses dimensi mutu dan relevansi pembelajaran. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah evaluasi internal untuk mendukung optimalisasi proses. Kegiatan evaluasi dikemas dalam bentuk triwulanan, bagaimana target sekolah bisa tercapai salah satunya dengan cara

bagaimana siswa dapat menghasilkan produk baru yang kompetitif serta memiliki daya jual, serta bagaimana siswa mendapatkan laba dari produk yang diproduksinya. Tidak hanya pada proses pembelajarannya, evaluasi juga dilakukan pada guru yakni dengan bagaimana ketrampilan mengajar dikelas, melalui supervisi guru yang sesuai dengan point pada borang akreditasi. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan kegiatan perbaikan atau melangkapi dari hasil evaluasi yang ada.

Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan pojok usaha kewirausahaan dalam bidang tanaman tradisional yang dinamakan "*The Herbs Drink*" dengan memproduksi sirup yang berasal dari tanaman tradisional serta pojok usaha kewirausahaan dalam bidang kimia yang dinamakan "*FarmClean*" dengan memproduksi sabun cuci piring, sabung cuci tangan, pembersih lantai, Handsanitizer, dll. Indikator yang dapat diterapkan adalah bagaimana seluruh siswa golongan tidak mampu dapat memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraannya. Tantangan yang dihadapi adalah ketika siswa golongan tidak mampu tidak memiliki minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pojok usaha kewirausahaan tersebut. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah mewajibkan seluruh siswa yang termasuk dalam golongan tidak mampu untuk berperan sebagai sumber daya manusia dalam pengembangan pojok usaha, sehingga tujuan utama dari pengembangan tersebut dapat tercapai.

Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi semua anggota masyarakat. Menurut *World Health Organization* (WHO), dikatakan sehat bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan, tetapi juga kesehatan secara fisik, mental, dan sosial seseorang. Dinegara berkembang diakui bahwa Tingkat Kesehatan melambangkan kesejahteraan bangsa, karena kesehatan itu memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, yang dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan (Gunawan & Kusniawati, 2019).

Lembaga Pendidikan bisa menunjukkan komitmen dengan memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan dari kecelakaan kepada semua karyawannya. Tujuan utama dari asuransi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Semua langkah ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keberhasilan program dapat diukur dari efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pegawai merupakan elemen kunci yang memengaruhi perkembangan sebuah organisasi. Menurut Robbins (2010), kualitas organisasi sangat ditentukan oleh kualitas individu yang terlibat di dalamnya. Untuk memastikan bahwa pegawai dapat bekerja secara produktif dan mencapai kinerja optimal, organisasi perlu memiliki sistem penghargaan yang sesuai dengan pencapaian individu, sehingga mereka dapat berkinerja maksimal sesuai dengan tujuan dan harapan organisasi (Gunawan & Kusniawati, 2019).

Gaji dan kesejahteraan adalah imbalan yang diterima seseorang sebagai pengganti pekerjaannya, bisa berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup individu dan mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan produktivitas tinggi. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, kepuasan pribadi individu juga tercapai. Sebaliknya, ketidakpuasan karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat mengurangi motivasi dan semangat kerja. Kesejahteraan ini berusaha untuk menjaga dan meningkatkan kondisi fisik dan mental pekerja agar produktivitas mereka meningkat. Dengan memenuhi kebutuhan fisik dan mental ini, diharapkan pekerja tetap termotivasi untuk bekerja hingga pensiun, serta mendorong terciptanya ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan loyalitas terhadap institusi tempat mereka bekerja.

Beberapa faktor yang memengaruhi kepuasan kerja pegawai meliputi pertimbangan terhadap tingkat penghasilan mereka, evaluasi sistem penggajian, dan pemberian perhatian terhadap kenaikan gaji secara rutin. Perbedaan dalam skala gaji antar pegawai ditetapkan berdasarkan lama bekerja dan posisi mereka dalam struktur organisasi. Kenaikan gaji yang terjadi saat naik pangkat diimplementasikan secara konsisten dengan aturan yang sama untuk semua pegawai. Dengan demikian, diharapkan bahwa kepuasan kerja pegawai dari berbagai tingkatan dan lama bekerja akan merata karena hal ini.

Indikator dalam implementasi ini adalah tingkat absensi kerja SDM yang rendah, kinerja pegawai yang sangat baik dengan penyelesaian jobdesk masing-masing pegawai dengan baik serta dapat menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan dalam lembaga. Tantangan yang terjadi adalah semua kewajiban lembaga terhadap pegawai sudah dipenuhi namun tidak mencerminkan nilai yang baik dalam kinerja pegawai. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif kepada pegawai yang memiliki kinerja bagus dalam evaluasi, sementara pegawai yang memiliki kinerja buruk akan diberikan sanksi.

Pendidikan Bermutu

Dengan semakin intensifnya usaha Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, salah satu aspek dalam dunia pendidikan yang masih memerlukan perhatian khusus adalah kondisi anak putus sekolah. Keadaan ini terjadi ketika Anak-anak dibiarkan terbengkalai karena sikap dan perlakuan orang tua yang kurang memperhatikan secara memadai proses perkembangan mereka, tanpa menghargai hak-hak mereka untuk menerima pendidikan yang memadai (Wulansari et al., 2024).

Strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menurunkan angka putus sekolah antara lain adalah memberikan bantuan dana kepada siswa miskin melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari rekanan lembaga pendidikan, memberikan beasiswa kepada siswa miskin dengan menganggarkan biaya potongan pembayaran sekolah dalam rencana keuangan sekolah, memfasilitasi siswa untuk mendapatkan

bantuan dana dari pemerintah seperti program Pemuda Tangguh, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Keluarga Harapan (PKH).

Tantangan yang ada dalam mengimplementasikan program tersebut adalah siswa yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak menyelesaikan pemberkasannya karena faktor keluarga atau eksternal. Selain itu, saat wawancara terindikasi bahwa sebenarnya siswa tersebut tidak termasuk dalam kategori yang membutuhkan bantuan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyederhanakan formulir pemberkasannya, namun tetap menjaga detail pada Prosedur Operasional Standar (SOP) tahap wawancara agar dana bantuan tersalurkan sesuai dengan tujuan Lembaga.

Selain mengalokasikan dana untuk pendidikan, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia dengan mengadopsi literasi digital. Tujuannya adalah untuk menyediakan pengetahuan dan informasi yang luas, serta memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan interaktif. Literasi digital membantu meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah, serta memperkuat keterampilan komunikasi yang sangat bernilai di era globalisasi saat ini.

Literasi digital adalah hal yang krusial untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Namun terdapat tantangan terkait akses, keterampilan, dan penggunaan teknologi digital yang bijak. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan dalam sarana digital, termasuk perangkat keras dan koneksi internet yang stabil. Selain itu, terdapat juga keterbatasan dalam keterampilan literasi digital baik pada staf maupun siswa, yang dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat ketrampilan literasi yang mereka miliki dan kurangnya minat. Masalah seperti penyalahgunaan data, keamanan, dan privasi juga menjadi perhatian saat membahas literasi digital. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan literasi digital perlu mempertimbangkan semua faktor tersebut dan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran serta penggunaan teknologi digital yang aman, etis, dan inklusif (Wulansari et al., 2024).

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan hak-hak asasi mereka serta potensi mereka dalam semua bidang kehidupan. Sementara itu, keadilan gender adalah menciptakan keadaan yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui kebijakan maupun budaya. Implementasi kesetaraan dan keadilan gender harus ada dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Pendidikan yang sensitif terhadap isu gender sangat penting diterapkan di semua lembaga pendidikan karena semua individu, tanpa memandang gender, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan sesuai dengan minat dan potensi mereka. Selain itu, kesenjangan dalam pendidikan telah menjadi faktor krusial yang mempengaruhi akses terhadap lapangan kerja, posisi, peran dalam masyarakat, dan juga kebebasan dalam berekspresi diri (Werdiningsih, 2020).

Di Lembaga Pendidikan ini, Ada lebih banyak siswa perempuan daripada siswa laki-laki. Bagaimanapun, Lembaga Pendidikan ini tetap berkomitmen untuk menjaga

kesetaraan gender bagi siswa laki-laki dengan memastikan bahwa tugas teori dan praktik diselesaikan dengan tanggung jawab yang sama oleh laki-laki dan perempuan. Mereka juga mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang setara dengan siswa perempuan dalam hal peran dan kebebasan berpendapat. Kesetaraan gender bukan hanya berlaku untuk siswa, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya yang dibangun di seluruh staf yang terlibat dalam Lembaga pendidikan, termasuk dalam hal jabatan, peran, penggajian, dan hak untuk menyuarakan pendapat.

Salah satu tantangan besar dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender adalah mengubah pandangan masyarakat yang terkadang melihat perbedaan gender secara dikotomis. Secara umum, terkait kebijakan penerimaan siswa baru di sekolah ini, mereka menegaskan bahwa tidak ada kebijakan khusus yang membedakan antara penerimaan siswa laki-laki dan perempuan. Sekolah menerapkan standar pencapaian kompetensi yang sama untuk kedua jenis kelamin, dan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran teori maupun praktik (Werdiningsih, 2020).

Indikator untuk menilai keberhasilan program ini diambil dari nilai rapor Pendidikan Lembaga yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi pada aspek proses mutu dan relevansi pembelajaran khususnya nilai yang tertera pada indikator iklim kesetaraan gender.

Dimensi	Indikator Level 1	
D. Mutu dan Relevansi Pembelajaran	Kualitas pembelajaran	Iklim kebinekaan
	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	Kesenjangan Iklim kebinekaan
	Kepemimpinan instruksional	Iklim inklusivitas
	Iklim keamanan sekolah	Kesenjangan Iklim inklusivitas
	Kesenjangan iklim keamanan sekolah	Kesenjangan fasilitas literasi satpen
	Iklim kesetaraan gender	Link and match dengan dunia kerja
	Kesenjangan iklim kesetaraan gender	Kesenjangan fasilitas literasi satpen

 Di level daerah dan satuan pendidikan
 Hanya ada di level daerah

Gambar 1. Aspek Proses dalam Rapor Pendidikan

Sumber: (Kementrian Pendidikan, 2022)

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Pelaksanaan praktik di laboratorium dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa. Namun, penggunaan bahan praktikum dalam laboratorium dapat menciptakan limbah yang akan membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan laboratorium dapat menghasilkan jenis limbah dengan banyak macamnya, termasuk limbah cair dan padat. Walaupun jumlah limbah hasil kegiatan praktikum dalam jumlah kecil jika dibandingkan dengan limbah industri, namun akumulasi sisa kegiatan praktikum bisa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan makhluk hidup lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Manajemen limbah di laboratorium merupakan bagian penting karena limbah cair dan padat dari laboratorium mengandung senyawa berbahaya dan beracun (B3), serta potensi bahaya dari limbah memiliki nilai yang signifikan dalam meracuni lingkungan. Didalam laboratorium diperlukan adanya tempa sampah yang terpisah untuk menampung limbah kimia yang harus dibuang. Proses penting yang harus diketahui adalah tidak mencampur limbah kimia karena pencampuran yang tidak benar dapat menghasilkan reaksi kimia yang tidak terduga, mengeluarkan panas, dan gas beracun atau berbahaya (Sulistiyorini et al., 2022).

Penanganan limbah yang tepat dapat dicapai dengan meningkatkan pemahaman tenaga laboratorium tentang cara-cara yang benar dalam mengelola limbah, serta melalui penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk pembuangan limbah hasil praktik. Tidak hanya tenaga laboratorium, tetapi juga penting bagi siswa untuk memahami cara-cara yang sesuai dalam membuang limbah. Namun, tantangan yang mungkin dihadapi dalam penanganan limbah di laboratorium adalah ketidakefektifan dalam penerapan SOP pengelolaan limbah, Sisa dari kegiatan laboratorium kimia yang dibuang langsung melalui saluran pembuangan memiliki potensi untuk mencemari lingkungan dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan di sekitarnya.

Manajemen pengelolaan limbah tergantung pada kepatuhan terhadap protokol. Selain itu juga bergantung pada kesadaran, sikap dan praktik oleh laboran yang ada dalam laboratorium. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penanganan dari pembuangan limbah yang tidak tepat menimbulkan resiko Kesehatan pada laboran maka dari itu untuk menciptakan kesadaran laboran dalam penanganan limbah melalui pelatihan berkala dan pemantauan rutin pada SOP pembuangan limbah praktik (Golondaj & Kallihal, 2021).

Salah satu risiko yang mungkin terjadi dalam operasional Lembaga Pendidikan adalah ketidaksesuaian rencana yang telah disusun dengan tren yang sedang berkembang. Hal ini dapat menghambat pencapaian target yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Cara mengatasi risiko ini adalah dengan melakukan evaluasi terhadap rencana tahunan dan merevisinya jika terjadi deviasi lebih dari 20% dari asumsi dan parameter sebelumnya. Selain itu, perlu melakukan pembaruan dengan menyusun atau memperbarui asumsi, parameter, dan target keuangan pada rencana tahunan agar sesuai dengan tren yang sedang berkembang. Penting juga untuk berkoordinasi dalam memperoleh pembaruan strategi bisnis sebagai langkah korektif untuk menghadapi perubahan kondisi yang terjadi.

Risiko terkait gangguan pada semua layanan TI dan potensi lumpuhnya sistem informasi karena serangan siber dan phishing dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap operasional Lembaga Pendidikan, mengakibatkan ketidakmampuan mengakses sistem informasi. Untuk mengatasi risiko ini, langkah yang dapat diambil adalah melakukan evaluasi keamanan untuk menguji keandalan sistem dan keamanan informasi dari berbagai aspek seperti infrastruktur, aplikasi, dan jaringan.

KESIMPULAN

Lembaga Pendidikan x dikota Surabaya melakukan program yang menuju pada tujuan *Sustainable Development Goals* 2030 (SDG 2030) antara lain: menunjukkan kontribusi konkret dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG) 2030 melalui berbagai program strategis berbasis pendidikan. Dalam mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), lembaga mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum serta mendorong siswa untuk menciptakan produk bernilai jual, seperti The Herbs Drink dan FarmClean. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan ekonomi siswa, khususnya dari kelompok tidak mampu. Meskipun keterbatasan anggaran pelatihan menjadi kendala, solusi yang ditempuh adalah memaksimalkan pelatihan tanpa biaya dan mendorong keterlibatan wajib bagi siswa kurang mampu sebagai bagian dari pengembangan unit usaha sekolah.

Terkait SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), lembaga telah menyediakan jaminan kesehatan dan kecelakaan bagi seluruh pegawai serta mengimplementasikan sistem penggajian berbasis masa kerja dan pangkat. Namun, belum optimalnya kinerja beberapa pegawai mendorong penerapan kebijakan pemberian insentif berbasis evaluasi kinerja dan sanksi administratif sebagai mekanisme pengendalian mutu. Dalam konteks SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), lembaga aktif menurunkan angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa dari dana internal maupun program bantuan pemerintah. Kendala utama berupa ketidaksesuaian pemberkasan dan validasi data siswa dijawab dengan penyederhanaan proses administrasi dan penguatan wawancara berbasis SOP. Selain itu, penguatan literasi digital dilakukan melalui alokasi anggaran sarana dan peningkatan kapasitas SDM, meskipun tantangan teknis dan keterampilan digital masih perlu diatasi. Untuk SDG 5 (Kesetaraan Gender), lembaga menerapkan prinsip kesetaraan dalam semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum, rekrutmen, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Indikator keberhasilannya diukur dari rapor mutu pendidikan yang mencerminkan iklim pembelajaran yang inklusif dan setara. Meski demikian, tantangan berupa paradigma masyarakat yang masih dikotomis terhadap gender direspons melalui pembudayaan nilai kesetaraan dalam lingkungan lembaga. Sedangkan pada SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), lembaga menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan limbah laboratorium secara ketat. Tingkat kepatuhan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan intensif dan pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran SOP.

Secara keseluruhan, Lembaga Pendidikan X telah mengimplementasikan pendekatan strategis yang relevan dan berorientasi keberlanjutan dalam mendukung SDG 2030. Meskipun masih terdapat tantangan pada aspek anggaran, partisipasi, dan kedisiplinan pelaksanaan, upaya perbaikan yang terus dilakukan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan bertanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 173–181.
- Azzahra, B. (2022). Integrated Reporting Adoption: Sustainable Corporate Strategy In Achieving Sdg 2030. *Ajar*, 5(01), 117–132. <https://doi.org/10.35129/ajar.v5i01.267>
- Definitif, D. (N.D.). Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Wujud Pendidikan Berkualitas Dalam Upaya Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs). *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 6 No. 2 Bulan November 2024*.
- Efferin, S. (2016). *Sistem Pengendalian Manajemen Berbasis Spiritualitas*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Firdaus, H., & Rusdiyanta, R. (2017). Tata Kelola Pendidikan Berdasarkan Unesco Road Map Sebagai Implementasi Sdgs Poin 4 Di Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Balcony*, 1(1), 1–12.
- Golandaj, J. A., & Kallihal, K. G. (2021). Awareness, Attitude And Practises Of Biomedical Waste Management Amongst Public Health-Care Staff In Karnataka, India. *Journal Of Humanities And Applied Social Sciences*, 3(1), 49–63. <https://doi.org/10.1108/JHASS-08-2019-0041>
- Gunawan, A., & Kusniawati, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Kepuasan Kerja Pegawai Puskesmas. *Journal Of Management Review*, 3(2), 307–319.
- Gustiana, A. D. (2024). *Model Induktif Kata Bergambar Berbantuan Smartphone (Mikbbs) Dalam Meningkatkan Literasi Siswa Sekolah Dasar-Damera Press*. Damera Press.
- Hemas, B. C. N. (2025). *Manfaat Dan Hambatan Tercapainya Keselarasan Tujuan Bagi Pt Samudera Indonesia Tbk*.
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131–154.
- Husamah, H. (2024). Literasi Urgensi Dan Peran Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*.
- Iskandar, A. H. (2020). *Sdgs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniawati, L. N. (2024). Analisis System Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajemen. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(11), 230–236.
- Niemela, T. (2024). Sdgs In Master's Theses: A Study Of A Finnish University Of Applied Sciences. *International Journal Of Sustainability In Higher Education*, 25(9), 137–154. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2023-0211>
- Sari, W. D. (2023). Education Sustainability Development (Esd) Teori Pada Manajemen Pendidikan Islam Di Era Digital. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001).
- Sulistiyorini, D., Purnamasari, E. R. W., & Dalimunthe, L. (2022). Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Kimia Di Laboratorium Pada

- Siswa Smk. *Jurnal Sehat Mandiri*, 17(2), 173–181.
<https://doi.org/10.33761/jsm.v17i2.822>
- Sutanto, H. P. (2017). Education For Sustainable Development In West Nusa Tenggara. *Cakrawala Pendidikan*, 3, 320–341.
- Tasliyah, A. L., Nuraeni, A., & Rachman, I. F. (2024). Literasi Digital: Kunci Menuju Pendidikan Berkualitas Melalui Perspektif Sdgs 2030. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 154–165.
- Werdiningsih, W. (2020). Analisis Kesetaraan Gender Pada Pembelajaran Program Keahlian Teknik Di Smk Pgri 2 Ponorogo. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(1), 71–92.
- Wulansari, S., Putri, F. I., & Rahman, I. F. (2024). Peluang Dan Tantangan Digitalisasi Pendidikan Dalam Pencapaian Sdgs 2030. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 129–137.
- Yudawisastra, H. G. (N.D.). *Buku Pengembangan Sustainable Development Goals (Sdgs)*. Penerbit Widina.